



RENCANA STRATEGIS

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2025 - 2029



**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
TAHUN 2025**



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Jalan Raya Jabon Nomor 190, Mojokerto, Jawa Timur 61364
Tlp. (0321) 332868 Faks. (0321) 332868
Laman <http://disperka.mojokertokab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 188/ 15 /416-117/2025
TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2025 - 2029

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi pemerintahan daerah di bidang pembangunan Perpustakaan dan Kearsipan, diperlukan Rencana Strategis sebagai penjabaran dan operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan perencanaan pembangunan jangka menengah sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh dan bertahap.
- b. bahwa agar Rencana Strategis dapat digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan perpustakaan dan kearsipan dipandang perlu untuk menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 – 2029 dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- c. bahwa dengan terbentuknya Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang baru pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto maka perlu adanya Penyusunan Rencana Strategis pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Peimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 tahun 2025 Tanggal 20 Agustus 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 – 2029.
13. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pepustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN MOJOKERTO TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN TAHUN 2025 – 2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto ini, yang dimaksud dengan :

- 1) Daerah adalah Kabupaten Mojokerto
- 2) Kabupaten adalah Kabupaten Mojokerto
- 3) Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
- 4) Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, desa dan kelurahan
- 5) Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 - 2029 yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah serta memperhatikan RPJM Provinsi dan RPJM Nasional.
- 6) Rencana Kerja yang selanjutnya disebut RENJA adalah penjabaran dari Renstra SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II

KEDUDUKAN DAN FUNGSI

PASAL 2

- 1) Renstra SKPD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto
- 2) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selanjutnya dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto ini.

BAB III
PROGRAM DAN SISTEMATIKA RENSTRA SKPD

Pasal 4

- 1) Program dan kegiatan pembangunan perpustakaan dan kearsipan di Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 – 2029 dilaksanakan sesuai Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto.
- 2) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD, PERMASALAHAN DAN
ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB IV : PENUTUP

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai kewenangan yang dimiliki melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD.

BAB V

PENUTUP

Pasal 6

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto
- 2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Mojokerto

Pada tanggal 16 September 2025

PIK KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN KABUPATEN MOJOKERTO



SUSWADI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat, ridha dan kehendak-Nya, Rencana Strategis Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto tahun 2025- 2029 dapat diselesaikan.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat program-program pembangunan bidang perpustakaan dan kearsipan yang bersifat indikatif yang akan dilaksanakan selama 3 (lima) tahun yaitu Tahun 2025 - 2029. Renstra ini juga yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto. Rencana strategis (RENSTRA) ini juga menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja (RENJA) setiap tahunnya, sebagai dasar penilaian kinerja dan menjadi acuan dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Disadari, bahwa masih banyak kekurangan pada Renstra Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto, oleh karena itu diperlukan masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitasnya dimasa yang akan datang.

Mojokerto, September 2025
Pt. KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN KABUPATEN MOJOKERTO

Drs. SISWADI MM
Pemangku Utama Muda/IVc
NIP. 196608101987011002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iv

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1. Latar Belakang..... 1

 1.2. Landasan Hukum..... 5

 1.3. Maksud Dan Tujuan..... 8

 1.4. Sistematika Penulisan..... 9

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 12

I. GAMBARAN PELAYANAN DAN PERMASALAHAN 12

 2.1. Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan..... 12

 2.2. Sumber Daya Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan..... 16

 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan..... 18

 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 22

II. PERMASALAHAN PELAYANAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 22

 2.5 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 22

 2.6 Isu Strategis 23

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN..... 26

III.1. TUJUAN DAN SASARAN 26

 3.1. Tujuan 26

 3.2. Sasaran 26

III.2. SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 30

 3.3. Sasaran Strategi Perangkat Daerah 30

 3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah..... 31

BAB IV ROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN 33

 4.1. Uraian Program 33

 4.2. Uraian Kegiatan 35

 4.3. Uraian Sub Kegiatan 36

 4.4. Uraian Sub Kegiatan, Kinerja, Indikator, Target Dan Pagu Indikatif 43

 4.5. Uraian Sub Kegiatan Yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 58

 4.6. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Renstra PD

Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD 58

4.7. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun
2025 2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) 59

BAB V PENUTUP 61

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Komposisi ASN Tahun 2025 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto berdasarkan Tingkat Pendidikan.....16

Tabel 2.2. Komposisi ASN Tahun 2025 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto berdasarkan Golongan17

Tabel 2.3. Komposisi ASN Tahun 2025 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto berdasarkan Klasifikasi Jabatan17

Tabel 2.4. Sarana Prasarana Pelayanan Tahun 2025 Pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto18

Tabel 2.5. Jumlah Koleksi Pustaka Tahun 2025 Pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto18

Tabel 2.6. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto 20

Tabel 2.7. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2025 21

Tabel 2.8. Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah 25

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah .. 26

Tabel 3.1.1. Sasaran penunjang Perangkat Daerah Tahun 2025-2030 27

Tabel 3.3.1. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 30

Tabel 3.4. Penahapan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto 31

Tabel 3.5. Penyusunan Arah Kebijakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto 31

Tabel 4.2. Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan RENSTRA Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan..... 37

Tabel 4.3. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 44

Tabel 4.4. Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 58

Tabel 4.5. Indikator Kinerja Utama (IKU) 58

Tabel 4.6. Indikator Kinerja Kunci (IKK) 59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto baru untuk periode 2025-2029 hasil proses pemilihan Kepala Daerah dan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa terselenggaranya Pemilihan Kepala Daerah setiap lima tahun sekali. Calon-calon Kepala Daerah diminta untuk menyampaikan visi, misi dan program prioritasnya dalam masa kampanye pemilihan dengan mengacu pada permasalahan dan isu strategis yang ada di Kabupaten Mojokerto. Adapun Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto periode Tahun 2025-2029 adalah **“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Lebih Maju, Adil dan Makmur”**. Visi tersebut mencerminkan cita-cita besar untuk membawa Kabupaten Mojokerto menuju perkembangan yang lebih baik di berbagai sektor. Visi ini mengandung makna mendalam yang mencerminkan harapan akan kemajuan, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Mojokerto. Perumusan dan penjelasan terhadap visi yang dimaksud dijabarkan lebih lanjut dalam beberapa pokok-pokok visi sebagai berikut :

1. Dalam penyusunan visi pembangunan Kabupaten Mojokerto untuk lima tahun ke depan, kata **"LEBIH"** memiliki makna mendalam yang mencerminkan semangat dan usaha untuk mewujudkan pembangunan yang lebih baik dibandingkan periode sebelumnya. Sebagai bagian dari pemerintahan yang berkelanjutan, visi ini tidak hanya berfokus pada keberlanjutan program-program yang telah berjalan, tetapi juga mengusung SEMANGAT PERUBAHAN guna meningkatkan kualitas pembangunan di segala aspek kehidupan masyarakat. Semangat perubahan ini diimplementasikan melalui pendekatan yang kolaboratif dan partisipatif dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat, termasuk pemerintah, sektor swasta, akademisi, serta masyarakat sipil. Dengan sinergi yang kuat, seluruh potensi daerah akan dimobilisasi secara optimal melalui kerja nyata dan program-program strategis yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mojokerto.
2. Makna **" Lebih Maju "** dimaksudkan pencapaian kondisi sosial ekonomi baik makro maupun mikro yang lebih baik sehingga mampu berdaya saing sampai pada tingkatan global. Dari perspektif ekonomi makro, pembangunan diarahkan pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, didukung oleh peningkatan investasi, optimalisasi sektor unggulan daerah, serta penguatan ekosistem industri dan perdagangan. Sementara itu, pada tingkat mikro, fokus utama adalah penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), peningkatan kapasitas tenaga kerja, serta pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat untuk menciptakan ekosistem

ekonomi yang lebih tangguh dan berdaya saing.

3. Makna " **Lebih Adil** " dalam visi pembangunan ini adalah pemerataan peran yang berorientasi pada penyediaan kesempatan yang berimbang baik sebagai obyek maupun sebagai subyek pembangunan serta pemerataan pemanfaatan hasil - hasil pembangunan dalam rangka terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Orientasi pada penyediaan kesempatan yang berimbang menegaskan bahwa tidak boleh ada kelompok yang tertinggal atau terpinggirkan dalam pembangunan. Setiap warga negara berhak untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan memperoleh manfaat dari kemajuan yang dicapai. Hal ini mencakup aspek ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur yang harus dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Pemerataan pemanfaatan hasil pembangunan berarti bahwa hasil dari berbagai program pembangunan tidak hanya dinikmati oleh segelintir pihak, tetapi tersebar secara adil di seluruh wilayah dan kelompok sosial. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan dan memastikan bahwa pembangunan benar-benar membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, bukan hanya bagi kelompok tertentu.
4. Makna "**Lebih Makmur**" dalam visi pembangunan Kabupaten Mojokerto mencerminkan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh melalui pemenuhan kebutuhan dasar yang lebih baik dan merata. Kemakmuran yang dimaksud tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas hidup masyarakat dalam berbagai aspek, seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, pembangunan infrastruktur, serta penguatan tata kelola pemerintahan dan penyediaan sarana prasarana publik.

Dalam upaya Terwujudnya Visi Kabupaten Mojokerto yang lebih maju, adil, dan makmur, Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto, merumuskan sebuah identitas kepemimpinan yang dikenal sebagai "Catur Abhipraya Mubarak". Branding misi ini bukan sekadar slogan, tetapi merupakan cerminan dari empat misi utama yang menjadi landasan pembangunan Mojokerto di periode 2025-2029.

"**Catur Abhipraya Mubarak**" berasal dari gabungan tiga kata yang sarat makna:

- Catur berarti "empat", merujuk pada empat pilar misi pembangunan.
- Abhipraya bermakna "harapan dan cita-cita mulia", yang mencerminkan tekad kuat dalam membawa perubahan positif.
- Mubarak diambil dari akronim nama pemimpin Kabupaten Mojokerto, yang juga berarti "berkah", menandakan semangat kepemimpinan yang membawa manfaat bagi masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Mojokerto yang telah ditetapkan, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Mojokerto tahun 2025-2029 yang dituangkan dalam "Catur Abhipraya Mubarak" sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
- 2) Mewujudkan SDM yang tangguh, cerdas, terampil, produktif dan berkarakter melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta menjaga ketentraman Masyarakat.
- 3) Membangun kemandirian ekonomi pada semua tingkatan, koperasi dan UM (Usaha Mikro) serta BUMDesa yang berbasis Masyarakat guna mewujudkan keluarga yang Sejahtera.
- 4) Meningkatkan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik dan mendukung akses sosial, budaya dan pelestarian lingkungan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto pada **Misi 1 : Meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.**

Untuk mendukung Visi dan Misi tersebut, disusunlah Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai tugas dan Fungsi Perangkat Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dalam penyusunannya Renstra Perangkat Daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lain baik di tingkat nasional maupun provinsi. Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah, Renstra Kementrian/Lembaga (K/L) dan Renja Perangkat Daerah adalah bahwa dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada RPJMD dan memperhatikan arah kebijakan Renstra K/L, Rencana Tata Ruang Wilayah, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Tentunya dalam menyusun Renstra ini, Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto merujuk pada visi dan misi pemerintah daerah Kabupaten Mojokerto. Di dalam Renstra ini terdapat 5 agenda utama dari pembangunan perpustakaan dan kearsipan di Kabupaten Mojokerto, yang meliputi :

- a. Mengembangkan perpustakaan melalui pendekatan berbasis inklusi sosial;
- b. Meningkatkan dan mengembangkan kapasitas sumberdaya manusia di bidang perpustakaan dan kearsipan;
- c. Meningkatkan dan mengembangkan perpustakaan dan kearsipan dengan berbasis pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
- d. Meningkatkan dan mengembangkan koleksi pustaka;
- e. Menerapkan tata kelola perpustakaan dan kearsipan secara akuntabel.

Rencana Strategis merupakan satu dokumen resmi perencanaan suatu organisasi dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun ke depan. Rencana strategis menetapkan arah dan tujuan kemana pelayanan organisasi akan dikembangkan, apa yang hendak dicapai pada masa 5 (lima) tahun mendatang, bagaimana mencapainya dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahun ke depan yang telah dibahas dengan seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan pemangku kepentingan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan. Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025-2029 mensinergikan perencanaan pembangunan Perpustakaan dan Kearsipan Nasional, dan Kabupaten Mojokerto melalui program-program perpustakaan dan Kearsipan dan merupakan satu kesatuan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029.

Rencana strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini berfungsi untuk mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi Bupati Mojokerto serta berbagai kebijakan pembangunan dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Mojokerto khususnya dalam bidang Perpustakaan dan Kearsipan. Rencana strategis ini juga sekaligus menerjemahkan secara strategis, sistematis, dan terpadu kedalam visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub Kegiatan prioritas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan serta tolok ukur pencapaiannya.

Lebih spesifik Rencana strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memiliki fungsi diantaranya:

1. Menerjemahkan arah dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan Perpustakaan Nasional, Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Propinsi Jawa Timur terkait perkembangan pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan agar lebih dipahami dan bermanfaat bagi masyarakat;
2. Merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan yang realistis, konsisten dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
3. Membangun rasa kepemilikan dari pemangku kepentingan terhadap rencana yang disusun oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
4. Membangun kesepakatan untuk memadukan semua sumber daya dalam mencapai tujuan;
5. Memastikan bahwa sumber daya dan dana yang ada diarahkan untuk menangani isu strategis yang menjadi prioritas pelayanan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
6. Menetapkan indikator kinerja sebagai alat ukur sejauh mana kemajuan dalam mencapai tujuan dan mengembangkan mekanisme guna menginformasikan perubahan apabila diperlukan;

7. Merumuskan prioritas, strategis dan langkah-langkah yang jelas untuk mencapai tujuan;
8. Membantu dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Proses penyusunan dokumen rencana strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan diawali dengan membangun komitmen dan kesepakatan dari semua pemangku kepentingan melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel. Pendekatan penyusunan yang digunakan dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, dan politis namun lebih dominan pada pendekatan proses teknokratis dan partisipatif karena pada dasarnya perencanaan ini merupakan penjabaran secara teknis dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Mojokerto tanpa mengenyampingkan masukan dari pemangku kepentingan lainnya. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa program yang dirumuskan benar-benar aspiratif dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025-2029 disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025–2029 dengan mengikuti kaidah-kaidah penyusunan Renstra seperti yang tertuang dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017. Perwujudan pelaksanaan Renstra akan dilakukan melalui Rencana Kerja (Renja) tahunan tanpa mengenyampingkan perubahan situasi dan kondisi kebutuhan.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025–2029 disusun berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standart Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5286);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal ;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
18. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
20. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan – Kawasan Bromo – Tengger – Semeru serta kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;
21. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
24. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi Perencanaan, Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD serta tata cara Perubahan RPJPD, Perubahan RPJMD, Perubahan RKPD;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal ;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
31. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
32. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Kep/135/M/PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5- 3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan inventarisasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
35. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor : 09 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 - 2032;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (KLA), Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 4 ;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah, Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 1 ;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025–2045;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029.
41. Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto.
42. Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto Nomor 188/021/416-117/2024 tanggal 16 Desember 2024 tentang Tim Penyusunan Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Periode 2025-2029, Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026, Rencana Kerja Perubahan (RENJA Perubahan) Tahun 2025 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan untuk kurun waktu tahun 2025-2029 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Mojokerto

Tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto.

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis adalah :

- a. Menjabarkan arahan dari RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 – 2029 ke dalam rencana instansional;
- b. Menjabarkan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih periode Tahun 2025–2029 ke dalam tujuan, sasaran, dan program kerja operasional serta kegiatan indikatif Perangkat Daerah;
- c. Menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai acuan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan;
- d. Menentukan strategi untuk : pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan komunikasi vertikal dan horisontal, peningkatan produktivitas dan menjamin efektifitas penggunaan sumber daya organisasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025–2029 sesuai INMENDAGRI No. 2 Tahun 2025, disusun dengan tata urutan sebagai berikut:

1. Bab I. Pendahuluan :

1.1. Latar Belakang

Berisi uraian pendahuluan, yang secara rinci berisi uraian penjelasan umum latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan disusunnya Renstra dan sistematika penulisan Renstra;

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memuat Peraturan yang menjadi dasar hukum Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang terdiri dari Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

1.3. Maksud dan Tujuan

Penjelasan tujuan dari disusunnya Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang dikaitkan dengan RPJMD, Penjabaran Visi dan Misi Bupati Terpilih, Rencana Kinerja Tahunan dan Strategi Pengelolaan Organisasi dalam pencapaian keberhasilan target.

1.4. Sistematika Penulisan

Berisikan urutan terstruktur dalam penyusunan rencana strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

2. Bab II. Gambaran Pelayanan, permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah

I. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Berisikan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sesuai dengan dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021

2.2. Sumber Daya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Memuat kondisi ketersediaan sumber daya di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam menjalankan dan melaksanakan Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Memuat penentuan target Indikator Kinerja Utama dan pencapaian keberhasilan selama 5 (lima) tahun pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai tolok ukur pencapaian keberhasilan di masa mendatang

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Berisi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

II. PERMASALAHAN PELAYANAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

a. Permasalahan pelayanan perangkat daerah

b. Isu Strategis

3. Bab III. Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan

Bab III paling sedikit memuat :

3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahun 2025-2029

3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahun 2025-2029

3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

3.4. Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029; dan

4. Bab IV. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan bidang urusan

1.1. Uraian program;

1.2. Uraian kegiatan;

1.3. Uraian sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;

1.4. Uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;

1.5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah;

- 1.6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

5. Bab V. Penutup.

Berisi uraian tentang kesimpulan, kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kerja Tahun 2025-2029, khususnya arahan agar Renstra dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kerja atau Rencana Kinerja Tahunan dan sebagai dasar untuk evaluasi kinerja Perangkat Daerah

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

I. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, sedangkan secara struktur dan fungsionalitasnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto, terdiri dari :

- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan unsur Pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Perpustakaan dan Kearsipan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perpustakaan dan kearsipan.
- Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto, sebagaimana pada Gambar 1

A. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Kedudukan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan unsur Pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Perpustakaan dan Kearsipan.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Uraian Tugas

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perpustakaan dan kearsipan.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
4. Pelaksanaan administrasi di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Tugas dan Fungsi masing-masing adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Kepala Dinas, mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk mengkoordinasikan bidang-bidang dan memberikan pelayanan administratif serta teknis yang meliputi urusan umum, kepegawaian, penyusunan program dan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran;
- b. Pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
- c. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, tata laksana dan hubungan masyarakat;
- d. Pelaksanaan dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan penataan organisasi;
- e. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pengamanan asset;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPTD di lingkungan Dinas;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Melakukan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;

- b. Melakukan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- c. Menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, distribusi dan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor;
- d. Menyusun bahan koordinasi dibidang administrasi umum dan kepegawaian;
- e. Melakukan pengelolaan dan pengamanan aset;
- f. Menyusun bahan koordinasi pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPTD di lingkungan Dinas di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
- g. Melakukan evaluasi dan penyusunan laporan, dan
- h. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

c. Bidang Perpustakaan.

Bidang Perpustakaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan meliputi layanan perpustakaan, pembinaan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca.

Dalam melaksanakan tugas bidang perpustakaan mempunyai fungsi :

- Perumusan konsep kebijakan teknis bidang pelayanan perpustakaan, pembinaan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca;
- Pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan perpustakaan, pembinaan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca;
- Pelaksanaan koordinasi bidang pelayanan perpustakaan, pembinaan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca
- Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang yang diberikan oleh Kepala Dinas.

d. Bidang Kearsipan

Bidang Kearsipan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan meliputi pengelolaan arsip dinamis, akuisisi dan pengelolaan arsip statis serta pembinaan kearsipan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Kearsipan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan rencana dan program Bidang Kearsipan;
- b. Pelaksanaan pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kearsipan kepada bawahan;
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan unit-unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas kearsipan;

- d. Perumusan peraturan dan bahan kebijakan pengembangan sumber daya manusia kearsipan di lingkup kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional;
- e. Pelaksanaan pengawasan/supervisi terhadap penyelenggaraan kearsipan perangkat daerah, badan usaha milik daerah (BUMD) kecamatan dan desa/kelurahan;
- f. Perumusan peraturan dan bahan kebijakan penggunaan sarana prasarana kearsipan di lingkup kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional;
- g. Pelaksanaan pengelolaan arsip statis dan arsip dinamis perangkat daerah, BUMD, perusahaan swasta dan perorangan berskala kabupaten;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- i. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

e. Bidang Pengembangan

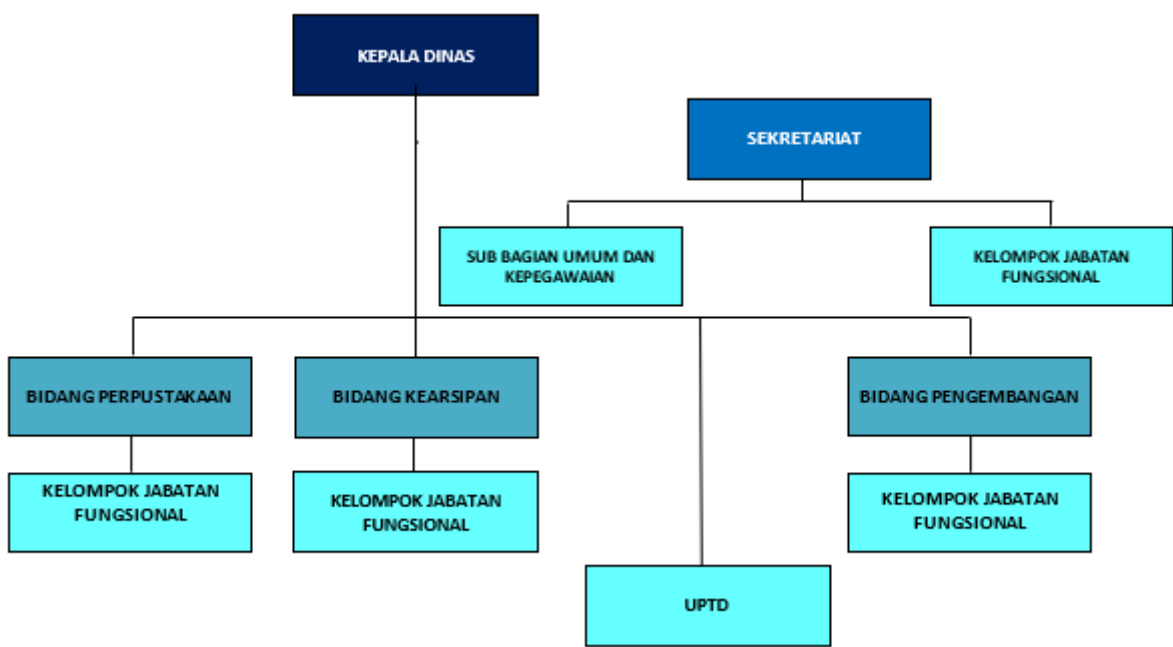
Bidang Pengembangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan meliputi teknologi informasi, kerjasama dan promosi serta pengembangan koleksi dan pengolahan bahan pustaka.

Dalam melaksanakan tugas Bidang pengembangan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan konsep kebijakan teknis dibidang pembinaan yang terkait dengan pengembangan perpustakaan dan kearsipan;
 - b. Perumusan perencanaan program kerja dan petunjuk teknis bidang pengembangan perpustakaan dan kearsipan;
 - c. Pelaksanaan pengembangan perpustakaan dan kearsipan;
 - d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan pengembangan perpustakaan dan kearsipan;
 - e. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan bidang lain dan lembaga/instansi lain yang berhubungan dengan perpustakaan dan kearsipan;
 - f. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;
 - g. Pelaksanaan tugas tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- **Kelompok Jabatan Fungsional**
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, keahlian, ketrampilan dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Kelompok Jabatan fungsional tersebut diatas dapat dibentuk sub Koordinator.

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto



2.2. SUMBER DAYA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto memiliki sumber daya yang cukup memadai untuk mendukung berbagai kegiatan perpustakaan dan kearsipan. Sumber daya utama yang akan disajikan dalam Renstra ini antara lain meliputi sumber daya manusia, sarana prasarana dan aspek strategis yang mempengaruhi jalannya pembangunan perpustakaan dan kearsipan.

Uraian berikut ini memberikan gambaran secara lebih rinci terkait dengan sumber daya Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto.

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto didukung oleh aparatur sipil negara sebanyak 23 orang dan 5 Orang Tenaga Harian Lepas (THL) dengan kriteria/klasifikasi sebagaimana uraian di bawah ini.

Tabel 2.1. Komposisi ASN Tahun 2025 Pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto berdasarkan Tingkat Pendidikan

Uraian	Tingkat Pendidikan							
	SD	SMP	SMA	D-3	S1	S2	S3	Jumlah
Laki-laki	-	-	2	2	3	3	-	10
Perempuan	-	-	1	2	5	2	-	15
Jumlah	-	-	3	4	11	5	-	25

Sumber Data : Disperka Kab. Mojokerto

Tabel 2.2. Komposisi Pegawai Tahun 2025 Pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto berdasarkan Golongan

Uraian	Golongan					
	THL	I	II	III	IV	Jumlah
Laki-laki	3	-	2	5	3	13
Perempuan	2	-	1	10	4	17
Jumlah	5	-	3	13	7	30

Sumber Data : Disperka Kab. Mojokerto

Tabel 2.3. Komposisi ASN Tahun 2025 Pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto berdasarkan klasifikasi jabatan

Uraian	Jabatan			Jumlah
	Jabatan Struktural	Jabatan Fungsional	Fungsional Umum	
Laki-laki	2	4	4	10
Perempuan	1	6	8	15
Jumlah	3	9	11	20

Sumber Data : Disperka Kab. Mojokerto

2.2.2. Gedung Kantor

Perpustakaan Kabupaten Mojokerto mempunyai 3 kantor yaitu :

- Gedung kantor I, yaitu kantor pusat layanan perpustakaan yang berada di Jl. Raya Jabon No. 190, dengan luas tanah 1.809. m² terdiri dari bangunan gedung kantor seluas 497 m² dan halaman seluas 1.312 m².
- Gedung kantor II, yaitu kantor layanan perpustakaan yang berada di Jl. Pemuda No. 10 Mojosari, dengan luas tanah 308 m² terdiri dari bangunan gedung kantor seluas 308 m².
- Gedung kantor III, yaitu bangunan untuk depo arsip yang berada di Jl. RA. Basuni, Sooko, Mojokerto dengan luas tanah 2.353 m² terdiri dari bangunan gedung kantor seluas 212 m² dan halaman seluas 2.141 m².

2.2.3. Sarana Prasarana Pelayanan

Sarana peralatan untuk layanan yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4. Sarana Prasarana Pelayanan Tahun 2025 Pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Kurang Baik
1.	Komputer	8 Unit	6	2
2.	Server	1 Unit	-	1
3.	AC	35 Unit	30	5
4.	TV LCD	6 Unit	5	1
5.	Proyektor	3 Unit	2	1
6.	Layar Proyektor	2 Layar	2	-
7.	Sound System	1 Unit	1	-
8.	Perangkat Band	1 Unit	1	-
9.	Kamera	5 Unit	4	1
10.	Handycam	2 Unit	2	-
11.	Wifi	3 Unit	3	-
12.	Mobil Perpustakaan Keliling	3 Unit	3	-

Sumber Data : Disperka Kab. Mojokerto

2.2.4. Koleksi Pustaka

Koleksi pustaka untuk layanan yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5. Jumlah Koleksi Pustaka Tahun 2025 Pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto

Jumlah Judul	Eksemplar	Surat Kabar	Keterangan
18.914	33.551	1 koran	

Sumber Data : Disperka Kab. Mojokerto

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Sampai saat ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto melakukan pelayanan selama 5 hari kerja mulai hari Senin sampai dengan Jum’at, dengan jadwal sebagai berikut:

- Hari Senin s/d Kamis : Jam 07.30 WIB s/d 16.00 WIB
- Hari Jum’at : Jam 07.00 WIB s/d 14.00 WIB

Sedangkan untuk memperluas jangkauan pelayanan perpustakaan, telah dioperasikan 3 unit mobil perpustakaan keliling (pusling). Yang melayani perpustakaan keliling ke tempat/instansi di wilayah Kabupaten Mojokerto atau sesuai permintaan masyarakat.

Disamping itu perpustakaan juga senantiasa berusaha mengembangkan layanan baik dalam hal jumlah layanan/kegiatan maupun kualitasnya. Beberapa layanan yang telah dilakukan oleh perpustakaan adalah :

1. Layanan Sirkulasi (Layanan Peminjaman)
2. Layanan Estensi (Perpustakaan Keliling)

3. Perpustakaan Terapan seperti, Workshop Ecoprint Media Kain, Workshop Ecoprint Media Kulit, Workshop Cap Godhong, Cooking Class, dan lain-lain
4. Layanan Pemetaan Akreditasi Perpustakaan
5. Layanan Pembinaan Perpustakaan Desa/ Kelurahan/ Kecamatan, Satuan Pendidikan, TBM (Taman Bacaan Masyarakat), Perpustakaan Komunitas.

Dalam upaya untuk lebih mengembangkan layanan baik dalam hal jumlah layanan/kegiatan maupun kualitasnya terhadap beberapa program/kegiatan tersebut di atas, perpustakaan melakukan berbagai stakeholder terkait baik instansi pemerintahan, swasta maupun masyarakat umum.

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Targ et NSP K	Targe t IKK	Targe t Indik ator Lainn ya	Base Line 2020	Target Renstra PD Tahun ke –				Realisasi Capaian Tahun ke –				Rasio Capaian pada Tahun			
						2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1.	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	n/a	n/a	n/a	n/a	78	79	85	88,31	82,86	88,3	86,1	88,75	106,23 %	105,4%	101,2 9%	100,4 9%
2.	TGM (Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat)	n/a	n/a	n/a	n/a	40	40,5	67	67	63,94	65,0	66,6	66,98	159,85 %	160,49 %	99,40 %	99,97 %
3	IPLM (Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat)	n/a	n/a	n/a	n/a	10,5	11	13,5	72,15	12,13 8	13,24	72,12	63,70	115,6%	120,36 %	534,2 2%	99,95 %
4	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	n/a	n/a	n/a	n/a	50%	100 %	100 %	100%	133, 7%	150 %	104,12 3%	103,9 %	267,4 %	150%	104, 123 %	103, 9%
5	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	n/a	n/a	n/a	n/a	50%	53 %	65 %	100%	167 %	60%	129,9 %	101,8 %	334%	113,2 %	129, 9%	101, 8%

Tabel 2.7.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2025

	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
Uraian ***)	2021	2022	2023	2024	2025		2021	2022	2023	2024	2025		2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
Urusan Perpustakaan dan Kearsipan	5.578.982.897	5.173.296.400	4.501.765.361	4.275.946.400	5.245.510.400		4.236.914.624	4.678.429.271	4.123.044.438	3.721.114.348			75,94 %	90,43 %	91,58 %	87,02 %			
Non Urusan	4.838.982.897	4.708.324.400	4.371.164.261	4.157.946.400	4.340.010.400		3.584.477.020	4.296.791.762	4.001.713.368	3.608.248.622			74,07 %	91,25 %	91,54 %	86,77 %			
Perpustakaan	602.500.000	404.972.000	72.314.100	65.000.000	845.266.800		516.330.904	321.738.959	65.555.820	61.164.746			85,69 %	79,44 %	90,65 %	94,09 %			
Kearsipan	137.500.000	60.000.000	57.287.000	53.000.000	60.233.200		136.106.700	59.898.550	55.775.250	51.700.980			98,98 %	99,83 %	97,36 %	97,54 %			

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam pelayanan adalah :

- a. Semakin meluasnya (Ketergantungan) masyarakat terhadap gadget sehingga menurunkan minat baca
- b. Pesatnya perkembangan teknologi informasi yang belum bisa diikuti/diadopsi
- c. Persepsi masyarakat yang rendah terhadap perpustakaan
- d. Belum adanya formasi pengisian tenaga ASN sesuai dengan kualifikasi kebutuhan
- e. Belum adanya landasan hukum yang bersifat operasional
- f. Belum tersedianya sarana prasarana khusus untuk pengelolaan kearsipan

Peluang Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam pelayanan adalah :

- a. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto
- b. Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- c. Rekomendasi ANRI nomor B-PK.02.09/72/2017 tentang Jadwal Retensi Arsip (JRA)
- d. Ketersediaan sumberdana dalam mendukung pelaksanaan tugas
- e. Ketersediaan sarana prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas
- f. Ketersediaan SDM dalam melaksanakan tugas
- g. Adanya Stakeholder dalam bersinergi kegiatan
- h. Adanya dukungan teknologi informasi yang semakin maju
- i. Lokasi yang strategis karena berdekatan dengan beberapa universitas, instansi, jalur utama (Jalan nasional)
- j. Terbukanya kesempatan untuk bekerjasama dengan pihak swasta dalam mendukung pelaksanaan kegiatan

II. PERMASALAHAN PELAYANAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.5 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto dalam perkembangannya, telah menghadapi berbagai dinamika yang tumbuh di masyarakat. Melalui analisis mendalam, penyusunan rencana jangka menengah perlu mempertimbangkan isu maupun permasalahan yang kerap terjadi di wilayah sebagai rujukan dalam menyusun Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto. Dengan mengetahui permasalahan yang kerap muncul diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada.

Identifikasi permasalahan menjadi hal penting dalam proses analisa isu-isu strategis yang sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu-isu Strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting atau keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Sumber lain isu strategis dari lingkungan eksternal (misal dari masyarakat, dunia swasta, perguruan tinggi, dunia riset, lembaga nonprofit dan lain-lain skala regional, nasional dan internasional juga merupakan unsur penting yang perlu diperhatikan dan menjadi masukan dalam menganalisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah.

2.6 Isu Strategis

Penentuan isu strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029, didasarkan pada faktor-faktor pelayanan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari :

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah ;
2. Telaah Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Arsip Nasional Republik Indonesia dan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur.

Isu Strategis Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Mojokerto masih rendah
2. Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (TGM) Kabupaten Mojokerto masih rendah.

3. Peningkatan mutu penyelenggaraan kearsipan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto belum optimal.
4. Penyediaan sarana dan Prasarana Kearsipan belum optimal.

Tabel 2.8 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional	
1	Masih Rendahnya Tingkat Literasi Masyarakat	Masih rendahnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM).	Rendahnya Minat Baca karena tingginya penggunaan Handphone	Rendahnya literasi digital	Peran Pendidikan Literasi	Program literasi daerah	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Mojokerto masih rendah
2	Masih Rendahnya Budaya Membaca Masyarakat	Masih rendahnya tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Kabupaten Mojokerto.	Masih rendahnya minat, gemar dan budaya membaca Masyarakat	Pengaruh media digital	Kampanye gemar membaca	Penyediaan perpustakaan di daerah	Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (TGM) Kabupaten Mojokerto masih rendah
3	Masih rendahnya Pengelolaan arsip daerah	Belum optimalnya penyelenggaraan kearsipan dan pengelolaan arsip dinamis di lembaga pencipta arsip, perangkat daerah Kabupaten.	Belum Optimalnya Pengarsipan dokumen administrasi kependudukan yang baik dikarenakan kurangnya sarana yang memadai (ruang yang representatif, tenaga pengarsipan dan prasarana IT kearsipan)	Tren digitalisasi arsip	Tren digitalisasi arsip (Global) Standart Nasional Pengelolaan Arsip	Harmonisasi JRA daerah	Peningkatan mutu penyelenggaraan kearsipan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto belum optimal
4	Kurangnya sarana dan prasarana kearsipan	Masih adanya arsip inaktif yang tersimpan di lembaga kearsipan tetapi belum memiliki daftar akses arsip.		Teknologi penyimpanan data	Penganggaran daerah untuk kearsipan	Pengadaan sarana dan prasarana kearsipan	Penyediaan sarana dan Prasarana Kearsipan belum optimal
		Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan arsip.					

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

III.1. TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Tujuan

Tujuan Perangkat Daerah merupakan penjabaran atau implementasi dari visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat Daerah yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 2025-2029 baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif.

Adapun tujuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto pada tahun 2025–2029 adalah **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**. Dengan Indikator **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**.

3.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang diukur dengan jelas, terintegrasi, terkoordinasi dan konsisten yang akan dicapai dalam kurun waktu 2025-2029. Sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 adalah Meningkatkan Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan dengan indicator Nilai IKM Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan.

Adapun Target kinerja dari tujuan dan sasaran Dinas perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto pada tahun 2025–2029 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1.
Tujuan,Sasaran, Indikator dan Target Kinerja 2025-2030

NSPK DAN SASARA N RPJMD YANG RELEVA N	TUJUAN	SASARAN	INDIKAT OR	TARGET TAHUN						KET ·
				202 5	2026	2027	202 8	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Mewujudk an Tata Kelola Pemerinta han yang Berintegrit as, Transparan , Akuntabel dan Responsif	Meningkat nya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatny a Literasi Masyarakat dan Meningkatny a Mutu Penyelengga raan Kearsipan	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	88,8	89	89,5	90	90,5	91	

Berdasarkan table 3.1 tersebut di atas dapat diperoleh informasi bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terdapat satu sasaran Utama yaitu meningkatnya Literasi Masyarakat dan Meningkatnya Mutu Penyelenggaraan Kearsipan Indikator Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat).

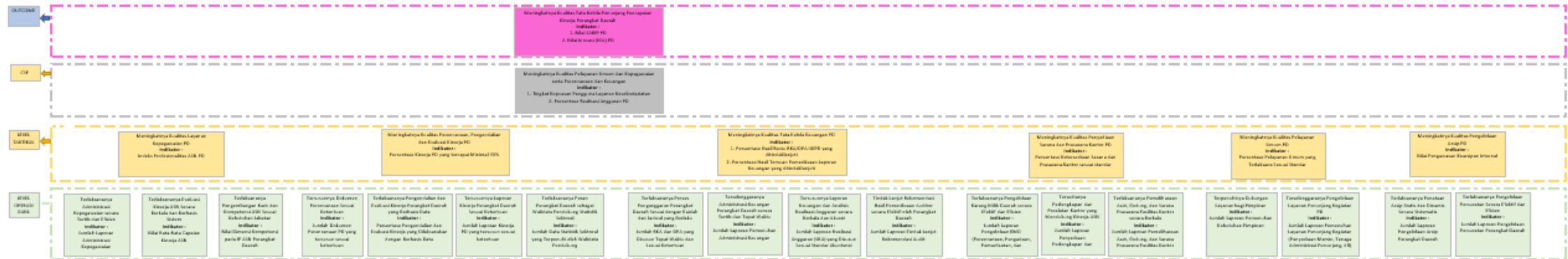
Selain Sasaran Strategis Utama tersebut diatas, Disperka Kabupaten Mojokerto juga menetapkan sasaran pendukung yang bersifat komplementer terhadap pencapaian kinerja Utama pada Urusan Perpustakaan dan Kearsipan. Sasaran tersebut adalah Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah.

Untuk memperjelas arah capaian sasaran ini, ditetapkan indicator kinerja berupa **“Nilai SAKIP Perangkat Daerah” dan Nilai Inovasi Perangkat Daerah (IGA Kemendagri)** dengan target capaian tahunan yang terukur sepanjang periode 2025-2030. Adapun rincian sasaran, indicator dan target tersebut disajikan dalam table berikut :

Tabel 3.1.1. Sasaran penunjang Perangkat Daerah Tahun 2025-2030

NSPK DAN SASARA N RPJMD YANG RELEVA N	TUJUAN	SASARAN	INDIKAT OR	TARGET TAHUN						KET ·
				202 5	2026	2027	202 8	2029	2030	
Mewujudk an Tata Kelola Pemerinta han yang Berintegrit as, Transparan , Akuntabel dan Responsif	Mewujudk an Tata Kelola Pemerintah an yang Berintegrit as, Transparan , Akuntabel dan Responsif	Meningkatny a Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,8 (A)	83 (A)	83,2 (A)	83,4 (A)	83,6 (A)	83,8 A)	
			Nilai Inovasi (IGA) Perangkat Daerah	85,2	85,4	85,7	86	86,4	86,9	

POHON KINERJA RUTIN PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025 – 2029



III.2. SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.3. Sasaran Strategi Perangkat Daerah

Perumusan pernyataan strategi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto dalam lima tahun mendatang dilakukan dengan merumuskan tahapan/langkah-langkah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran telah ditetapkan, berdasarkan :

- 1. Pengkajian sasaran jangka menengah periode sebelumnya dan yang akan datang.
- 2. Pengkajian gambaran umum pelayanan, capaian dan permasalahan *pembangunan* serta isu-isu strategis pembangunan daerah
- 3. Analisis Lingkungan internal dan eksternal untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk setiap strategi yang akan dipilih.

Untuk Strategi sebagaimana perumusan arah dan kebijakan, dirumuskan dengan menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih realistis, memperjelas strategi sehingga lebih focus (kelompok sasaran/lokus), konkrit dan operasional agar lebih terarah dalam mencapai target-target tujuan dan sasaran.

Hasil perumusan strategi dan arah kebijakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto dalam lima tahun mendatang sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.3
Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran
Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

VISI	:	TERWUJUDNYA KABUPATEN MOJOKERTO YANG LEBIH MAJU, ADIL DAN MAKMUR		
MISI 1	:	Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat dan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik		
Tujuan		Sasaran	Isu Strategi	Strategi
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Meningkatnya Literasi Masyarakat dan Meningkatnya Mutu Penyelenggaraan Kearsipan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Mojokerto masih rendah	Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana serta sumber daya manusia perpustakaan
			Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (TGM) Kabupaten Mojokerto masih rendah	Pengembangan bahan pustaka
			Peningkatan mutu penyelenggaraan kearsipan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto belum optimal	Peningkatan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan serta pengelolaan kearsipan di Kabupaten Mojokerto
			Penyediaan sarana dan Prasarana Kearsipan belum optimal	Penyediaan sarana dan Prasarana Kearsipan

Langkah berikutnya dari penyusunan arah dan tujuan, strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, maka langkah selanjutnya adalah mempersiapkan penahapan pembangunan prioritas Perpustakaan dan kearsipan tahunan, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, penahapan tersebut antara lain :

Tabel 3.4.
Penahapan Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	2	3	4	5
Peningkatan fasilitas perpustakaan keliling dan layanan baca	Pengadaan sarana berbasis digital untuk perpustakaan	Peningkatan kapasitas SDM perpustakaan melalui pelatihan	Pengembangan layanan perpustakaan digital	Evaluasi dan pengembangan layanan perpustakaan berbasis teknologi
Identifikasi kebutuhan bahan pustaka lokal	Pengadaan bahan pustaka digital dan cetak	Digitalisasi koleksi bahan pustaka	Pengembangan koleksi literasi digital	Optimalisasi koleksi pustaka berbasis kebutuhan masyarakat
Peningkatan kapasitas SDM kearsipan	Implementasi sistem pengelolaan arsip digital	Peningkatan standar pelayanan kearsipan	Pengembangan aplikasi kearsipan berbasis digital	Optimalisasi layanan kearsipan berbasis teknologi informasi

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Arah dan kebijakan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025-2029 ini menjadi rangkaian kerja operasionalisasi NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) dimana dimaksud tugas dan fungsi perangkat daerah Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto selaras dengan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran renstra OPD. Berikut ini dilampirkan tabel teknik dalam merumuskan arah kebijakan Renstra OPD :

Tabel 3.5.

Penyusunan Arah Kebijakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1. Implementasi Teknologi Informasi : Memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi administrasi, mempercepat proses pengambilan keputusan dan meningkatkan keterbukaan informasi publik. Ini termasuk optimalisasi dan percepatan pengembangan sistem e-gouverment untuk pelayanan publik yang lebih baik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan	
		2. Reformasi Hukum dan Regulasi : Menuatkan kerangka hukum dan Regulasi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan perlindungan serta kepastian hukum bagi semua pihak tanpa terkecuali. Hal ini dapat meliputi revisi beragam peraturan/regulasi dan kebijakan terkait yang diidentifikasi sudah kurang relevan dan memerlukan pembaharuan	Meningkatkan Akses Bahan Pustaka Digital dan Cetak	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
			Mengoptimalkan Sistem Pengelolaan Arsip Digital di Lingkungan Pemerintah Daerah	
			Meningkatkan Kompetensi SDM Perpustakaan dan Kearsipan melalui Pelatihan dan Sertifikasi	
			Meningkatkan Pengembangan Koleksi Literasi Lokal dan Budaya Kabupaten Mojokerto	
			Meningkatkan Program Literasi Digital untuk Masyarakat Umum	
			Meningkatkan Implementasi Perpustakaan Digital di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto	
			Meningkatkan Evaluasi Pengelolaan Arsip pada Perangkat Daerah	
			Meningkatkan Sosialisasi Pentingnya Kearsipan bagi Masyarakat dan Lembaga	
			Meningkatkan Kerjasama Antar Perangkat Daerah dalam Pengelolaan Arsip	
			Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN

Pada bab ini, akan diuraikan mengenai rencana program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto, yang disertai indikator kinerja, kelompok sasaran, serta pendanaan indikatifnya. Program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto merupakan program prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selanjutnya, program prioritas dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas didasarkan pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang kemudian dijadikan komitmen strategi dan kebijakan perencanaan jangka menengah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto dalam penyusunan program dan kegiatan perlu juga menetapkan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat, dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis Organisasi. Hal ini mengingat rencana kinerja akan menjadi gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan datang. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Penetapan kinerja organisasi dimaksud agar dapat tepat sasaran, tepat guna, dan hasil yang optimal, maka perlu memenuhi kriteria antara lain sebagai berikut:

1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah;
2. Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan;
3. Memfokuskan pada hal-hal utama, penting dan merupakan prioritas program pembangunan daerah, dan;
4. Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah

4.1. Uraian Program

Program Perpustakaan dan Kearsipan merupakan bagian integral dari pembangunan sumber daya manusia dan pengelolaan informasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan dan pengelolaan arsip serta

memperluas akses masyarakat terhadap informasi yang akurat dan terpercaya. Program ini dirancang untuk menjawab tantangan utama di sektor perpustakaan dan kearsipan, seperti rendahnya minat baca, kurangnya kesadaran akan pentingnya arsip, serta terbatasnya akses literasi informasi di daerah terpencil.

Adapun fokus utama dalam pelaksanaan program perpustakaan dan kearsipan meliputi:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan kearsipan. Program ini mencakup kegiatan-kegiatan pendukung seperti penguatan kapasitas sumber daya manusia, pengelolaan anggaran dan aset, serta pengembangan sistem informasi manajemen. Indikator kinerja program ini meliputi peningkatan kualitas pelayanan administrasi, optimalisasi penggunaan anggaran, dan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan perpustakaan dan arsip.

2. Program Pembinaan Perpustakaan

Program Pembinaan Perpustakaan bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan serta meningkatkan literasi masyarakat Kabupaten Mojokerto. Kegiatan yang dilakukan antara lain pengembangan perpustakaan keliling, pengadaan bahan bacaan dan koleksi perpustakaan, serta penyelenggaraan program literasi untuk masyarakat. Sasaran program ini adalah pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum di wilayah Kabupaten Mojokerto. Indikator kinerja program ini meliputi Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (TGM).

3. Program Pengelolaan Arsip

Program Pengelolaan Arsip merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengelola arsip secara sistematis dan efektif mulai dari penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, hingga penyusutan arsip. Program ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan informasi yang autentik, lengkap, dan terjaga keasliannya, serta mendukung akuntabilitas dan transparansi organisasi. Pengelolaan arsip mencakup berbagai aspek, termasuk penyusunan pedoman kearsipan, penataan ruang arsip, penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan arsip elektronik, serta pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi pengelolaan arsip. Dengan adanya program ini, instansi pemerintah maupun organisasi lainnya dapat menjaga keberlangsungan informasi penting, mengoptimalkan pemanfaatan arsip, serta mengurangi risiko kehilangan atau kerusakan arsip yang bernilai guna tinggi.

4. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip berfokus pada upaya menjaga keamanan dan keberlangsungan arsip dinamis dan statis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi digitalisasi arsip penting, penataan dan penyimpanan arsip statis, serta penyelenggaraan pelatihan pengelolaan arsip bagi OPD. Sasaran program ini adalah OPD dan masyarakat umum yang membutuhkan akses terhadap arsip. Indikator kinerja program ini meliputi jumlah arsip yang terdigitalisasi, tingkat keamanan arsip statis, dan peningkatan kualitas penyimpanan arsip.

Program-program tersebut disusun untuk mendukung peningkatan kualitas pengelolaan arsip dan layanan perpustakaan di Kabupaten Mojokerto, serta mendukung visi dan misi Kepala Daerah dalam penguatan literasi dan kearsipan berbasis digital.

4.2. Uraian Kegiatan

Kegiatan perpustakaan dan kearsipan merupakan rangkaian aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan informasi, menjaga kelestarian arsip, serta mendukung pengembangan literasi masyarakat. Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak seperti instansi pemerintah, dunia pendidikan, komunitas literasi, serta masyarakat umum, khususnya pelajar, mahasiswa, dan perangkat desa. Melalui berbagai program seperti layanan perpustakaan keliling, workshop literasi, sosialisasi produk hukum kearsipan, dan pelatihan pengelolaan arsip dinamis, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto berupaya menciptakan masyarakat yang cerdas informasi, peduli arsip, dan berdaya saing.

Adapun rencana kegiatan Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto untuk Tahun 2025–2029 adalah sebagaimana tabel berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
8. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
9. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten / Kota
10. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten / Kota
11. Pemusnahan Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah Kab/kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun

4.3. Uraian Sub Kegiatan

Perumusan sub kegiatan merupakan langkah penting dalam penyusunan dokumen perencanaan yang sistematis dan terukur. Rencana tersebut berfungsi sebagai panduan dalam pelaksanaan program agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Adapun perumusan rencana tersebut dapat diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.2.

Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan RENSTRA Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Transparan, Akuntabel dan Responsif.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang			1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
		Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah			2. Nilai Inovasi (IGA) Perangkat Daerah		
			Meningkatnya kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Keuangan		1. Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	
					2. Presentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	
				Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kinerja Perangkat Daerah yang tercapai	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan yang ditindaklanjuti	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
				Meningkatnya Kualitas Layanan Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
				Meningkatnya Kualitas Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Umum yang terlaksana sesuai standar	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Paket Bahan/ Material yang disediakan	Penyediaan Bahan / Material	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Umum yang terlaksana sesuai Standar	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Meningkatnya Kualitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	Pemeliharaan Barang Milik Negara Penunjang Urusan Pemeruintah Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya Literasi Masyarakat dan Meningkatkan Mutu Penyelenggaraan Kearsipan			Nilai IKM Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan		
			Meningkatnya Literasi Masyarakat		1. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) 2. Indeks Kegemaran Membaca (TGM)	Program Pembinaan Perpustakaan	
				Meningkatnya Perpustakaan Daerah yang dikelola	Jumlah Perpustakaan Daerah yang dikelola	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
					Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang dilakukan Pembinaan dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten / Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	
					Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	
					Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Daerah Kabupaten / Kota yang dikembangkan	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	
					Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang dikembangkan dengan manajemen Layanan TIK	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	
				Meningkatnya kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca	Jumlah kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	
					Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	
					Jumlah Sarana Perpustakaan yang dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	
					Jumlah Orang yang mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca tingkat Kabupaten/Kota	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
					Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	
			Meningkatnya Pengelolaan Arsip		Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan Akuntabilitas Kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional.	Program Pengelolaan Arsip	
				Jumlah PD yang sudah mengelola Arsip Dinamis sesuai aturan	Jumlah PD yang sudah mengelola Arsip Dinamis sesuai aturan	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten / Kota	
					Jumlah Naskah Dinas yang dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Jumlah PD yang sudah menyerahkan Arsip Statis ke Lembaga Kearsipan Daerah	Jumlah PD yang sudah menyerahkan Arsip Statis ke Lembaga Kearsipan Daerah	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten / Kota	
					Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
			Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan Bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	
				Jumlah Arsip di lingk Pemerintah Daerah Kab/kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun yang dilakukan Pemusnahan	Jumlah Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah Kab/kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun yang dilakukan Pemusnahan	Pemusnahan Arsip di lingk Pemerintah Daerah Kab/kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	
					Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	

4.4. Uraian Sub Kegiatan, Kinerja, Indikator, Target Dan Pagu Indikatif

Berdasarkan pada tabel diatas, didapatkan bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto melaksanakan 1 (satu) Tujuan dan 1 (satu) indikator tujuan, kemudian di level Sasaran terdapat 3 (tiga) sasaran dan 3 (tiga) indikator sasaran. Sementara itu untuk di level program terdiri dari 4 (empat) program dan 5 (lima) indikator program. Sedangkan pada level kegiatan/ sub kegiatan terdapat 11 (sebelas) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu periode tahun 2025-2029 sesuai dokumen Rencana Strategis yang disusun.

Setelah tahapan merumuskan program/ kegiatan dan sub kegiatan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto, langkah berikutnya adalah menyusun rencana program/ kegiatan/ dan sub kegiatan dengan diberikan jumlah penganggaran yang dibutuhkan pada kondisi ideal OPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto untuk melaksanakan program-program di wilayah Kabupaten Mojokerto, berikut ini adalah tabel perumusan program/ kegiatan/ sub kegiatan disertai kebutuhan penganggarnya :

Tabel 4.3.

Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCO ME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
URUSAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				5.471.794.896		5.546.794.896		5.636.794.896		5.716.794.896		6.023.756.497	2.23.2.24.0.00.02.000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				5.311.794.896		5.371.794.896		5.441.794.896		5.501.794.896		5.798.756.497	
2.23.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota													
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,75	83	4.429.294.896	83,2	4.459.294.896	83,4	4.499.294.896	83,6	4.529.294.896	83,8	4.923.756.497	
	2. Nilai Inovasi (IGA) Perangkat Daerah	n/a	86		87		88		89		90		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Keuangan	1. Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan	n/a	90%		90%		90%		90%		90%		
	2. Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	87,02%	88%		88,2%		88,40%		88,6 %		88,8 %		
2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCO ME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya Kualitas Perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase kinerja Perangkat Daerah yang tercapai	100%	90%	15.000.000	90%	15.000.000	90%	15.000.000	90%	15.000.000	90%	15.000.000	
2.13.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun sesuai ketentuan	3 dokumen	3 dokumen	7.500.000	2 dokumen	7.500.000	2 dokumen	7.500.000	2 dokumen	7.500.000	3 dokumen	7.500.000	
2.23.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berbasis Data	Persentase Pengendalian dan Evaluasi Kinerja yang dilaksanakan dengan berbasis data	7 Laporan	7 Laporan	7.500.000	7 Laporan	7.500.000	7 Laporan	7.500.000	7 Laporan	7.500.000	7 Laporan	7.500.000	
2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
Meningkatnya kualitas Tata Kelola Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan yang ditindaklanjuti	n/a		4.019.900.000		4.019.900.000		4.019.900.000		4.019.900.000		4.393.844.097	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCO ME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.23.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
Terselenggggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah secara tertib dan tepat waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bula n	25 Orang/bula n	4.019.900.0 00	25 Orang/bula n	4.019.900.0 00	25 Orang/bula n	4.019.900.0 00	25 Orang/bula n	4.019.900.0 00	25 Orang/bula n	4.393.844.0 97	
2.23.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													
Meningkatnya kualitas Layanan Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas (IP) ASN Perangkat Daerah	86,5	86,6	15.000.000	86,7	15.000.000	86,8	20.000.000	86,9	25.000.000	87	12.150.000	
2.23.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya													
Terlaksananya Administrasi Kepegawaian secara tertib dan efisien	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	1 Paket	15.000.000	1 Paket	15.000.000	1 Paket	20.000.000	1 Paket	25.000.000	1 Paket	12.150.000	
2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		n/a											
Meningkatnya Kualitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar		90%	137.500.00 0	90%	157.500.00 0	90%	177.500.00 0	90%	197.500.00 0	90%	167.500.00 0	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCO ME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana sesuai Standar												
2.23.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
Tersedianya Perlengkapandan Peralatan Kantor yang mendukung Kinerja ASN	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	75.000.000	1 Paket	80.000.000	1 Paket	85.000.000	1 Paket	90.000.000	1 Paket	75.000.000	
2.23.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
Terselenggaranya Pengelolaan Layanan Penunjang Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	15.000.000	1 Paket	20.000.000	1 Paket	25.000.000	1 Paket	30.000.000	1 Paket	25.000.000	
2.23.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
Terseenggaranya Pengelolaan Layanan Penunjang Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	7.500.000	1 Paket	7.500.000	1 Paket	7.500.000	1 Paket	7.500.000	1 Paket	7.500.000	
2.23.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan / Material													

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCO ME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terselenggaranya Pengelolaan Layanan Penunjang Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/ Material yang disediakan	1 Paket	1 Paket	25.000.000	1 Paket	30.000.000	1 Paket	35.000.000	1 Paket	40.000.000	1 Paket	35.000.000	
2.23.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
Terpenuhinya Dukungan Layanan bagi Pimpinan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28 Laporan	25 Laporan	15.000.000	25 Laporan	20.000.000	25 Laporan	25.000.000	40 Laporan	30.000.000	40 Laporan	25.000.000	
2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Umum yang teerlaksana sesuai standar	n/a	86%	156.194.89 6	86%	156.194.89 6	86%	156.194.89 6	86%	156.194.89 6	86%	225.262.40 0	
2.23.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
Terselenggaranya Pengelolaan Layanan Penunjang Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	106.932.49 6	12 Laporan	106.932.49 6	12 Laporan	106.932.49 6	12 Laporan	106.932.49 6	12 Laporan	160.262.40 0	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCO ME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.23.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
Terselenggaranya Pengelolaan Layanan Penunjang Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	49.262.400	12 Laporan	49.262.400	12 Laporan	49.262.400	12 Laporan	49.262.400	12 Laporan	65.000.000	
2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
Meningkatnya Kualitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	n/a	90%	85.700.000	90%	95.700.000	90%	110.700.000	90%	115.700.000	90%	110.000.000	
2.23.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
Terlaksananya Pemeliharaan Aset, Gedung dan Sarana Prasarana Fasilitas Kantor secara Berkala	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	10 Unit	45.700.000	10 Unit	50.700.000	10 Unit	55.700.000	10 Unit	55.700.000	10 Unit	39.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCO ME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.23.01.2.09.0009 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
Terlaksananya Pemeliharaan Aset, Gedung dan Sarana Prasarana Fasilitas Kantor secara Berkala	Jumlah unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	20.000.000	3 Unit	20.000.000	3 Unit	25.000.000	3 Unit	25.000.000	3 Unit	36.000.000	
2.23.01.2.09.0010 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
Terlaksananya Pemeliharaan Aset, Gedung dan Sarana Prasarana Fasilitas Kantor secara Berkala	Jumlah unit Pemeliharaan/Rehabi litasi Sarana dan Prasarana	1 Unit	1 Unit	20.000.000	1 Unit	25.000.000	1 Unit	30.000.000	1 Unit	35.000.000	1 Unit	35.000.000	
2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN													
Meningkatnya Literasi Masyarakat	1. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	63,7	72,35	882.500.00 0	72,45	857.500.00 0	72,55	942.500.00 0	72,65	972.500.00 0	72,65	875.000.00 0	2.23.2.24.0.00.02.0 000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2. Indeks Kegemaran Membaca (TGM)	66,9	67,2		67,3		67,4		67,5		67,5		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCO ME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota													
Terlaksananya Pengelolaan Perpustakaan Daerah	Jumlah Perpustakaan Daerah yang dikelola			355.000.00 0		380.000.00 0		400.000.00 0		420.000.00 0		457.500.00 0	
2.23.02.2.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten / Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan													
Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten / Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang dilakukan Pembinaan dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan		75 Perpustaka an	15.000.000	75 Perpustaka an	20.000.000	75 Perpustaka an	25.000.000	75 Perpustaka an	30.000.000	75 Perpustaka an	30.000.000	
2.23.02.2.01.0017 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan													
Tersusunnya Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan	1 Dokumen	1 Dokumen	112.500.00 0	1 Dokumen	112.500.00 0	1 Dokumen	112.500.00 0	1 Dokumen	112.500.00 0	1 Dokumen	112.500.00 0	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.23.02.2.01.0018 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan													
Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan untuk mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	-	300 Eksemplar	25.000.000	350 Eksemplar	35.000.000	400 Eksemplar	40.000.000	450 Eksemplar	45.000.000	500 Eksemplar	50.000.000	
2.23.02.2.01.0019 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten / Kota													
Tersedianya Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Daerah Kabupaten / Kota yang dikembangkan	10 eksemplar	10 eksemplar	195.000.000	10 eksemplar	200.000.000	11 eksemplar	205.000.000	11 eksemplar	210.000.000	12 eksemplar	210.000.000	
2.23.02.2.01.0020 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik													

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCO ME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksannya Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik dengan manajemen layanan TIK	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang dikembangkan dengan manajemen Layanan TIK	1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	7.500.000	1 Perpustakaan	12.500.000	1 Perpustakaan	17.500.000	1 Perpustakaan	22.500.000	1 Perpustakaan	55.000.000	
2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten / Kota													
Terlaksananya Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten	Jumlah kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca	-	75 kali	527.500.000	75 kali	477.500.000	75 kali	542.500.000	75 kali	552.500.000	75 kali	417.500.000	
2.23.02.2.02.0007 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial													
Terlaksananya Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	20.000.000	1 Perpustakaan	20.000.000	1 Perpustakaan	25.000.000	2 Perpustakaan	30.000.000	3 Perpustakaan	30.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCO ME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.23.02.2.02.0008 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota													
Terlaksananya Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Sarana Perpustakaan yang dibangun dan dipelihara di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	1 Perpustaka n	1 Perpustaka an	35.000.000	1 Perpustaka an	35.000.000	1 Perpustaka an	35.000.000	1 Perpustaka an	35.000.000	1 Perpustaka an	45.000.000	
2.23.02.0009 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca													
Terlaksananya Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca tingkat Kabupaten/Kota	600 Orang	600 Orang	245.000.00 0	600 Orang	245.000.00 0	600 Orang	245.000.00 0	600 Orang	245.000.00 0	600 Orang	100.000.00 0	
2.23.02.2.02.0010 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat													

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCO ME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	75 locus	75 Lokus	227.500.000	75 Lokus	232.500.000	85 Lokus	237.500.000	95 Lokus	242.500.000	100 Lokus	242.500.000	
2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				160.000.000		175.000.000		195.000.000		215.000.000		225.000.000	
2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP													
Meningkatnya Pengelolaan Arsip	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan Akuntabilitas Kinerja	n/a	100%	140.000.000		150.000.000		165.000.000		180.000.000		185.000.000	2.23.2.24.0.00.02.000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten / Kota													
Meningkatnya Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah PD yang sudah mengelola Arsip Dinamis sesuai aturan	56 PD	5 OPD	60.000.000		70.000.000		80.000.000		90.000.000		90.000.000	
2.24.02.2.01.0002 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis													
Terlaksananya Pemeliharaan dan	Jumlah Naskah Dinas yang dilakukan	800 Berkas	800 Berkas	35.000.000	1.000 Berkas	40.000.000	1.200 Berkas	45.000.000	1.400 Berkas	50.000.000	1.6400 Berkas	50.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penyusutan Arsip Dinamis	Pemeliharaan dan Penyusutan												
2.24.02.2.01.0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota												40.000.000	
Terlaksananya Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 laporan	25.000.000	1 laporan	30.000.000	1 laporan	35.000.000	1 laporan	40.000.000	1 laporan	40.000.000	
2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten / Kota													
Terlaksananya Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah PD yang sudah menyerahkan Arsip Statis ke Lembaga Kearsipan Daerah		5 OPD	80.000.000		80.000.000		85.000.000		90.000.000		95.000.000	
2.24.02.2.02.0004 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis													
Terlaksananya Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	500 Arsip	500 berkas	80.000.000	500 Berkas	80.000.000	520 Berkas	85.000.000	540 Berkas	90.000.000	560 Berkas	95.000.000	
2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN													2.23.2.24.0.00.02.000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCO ME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PENYELAMATAN ARSIP													
Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaba n	100%	100%	20.000.000	100%	25.000.000	100%	30.000.000	100%	35.000.000	100%	40.000.000	
2.24.03.2.01 Pemusnahan Arsip di lingk Pemerintah Daerah Kab/kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun													
Terlaksananya Pemusnahan Arsip di lingk Pemerintah Daerah Kab/kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah Kab/kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun yang dilakukan Pemusnahan	500 Arsip	500 Arsip	20.000.000	600 Arsip	25.000.000	700 Arsip	30.000.000	800 Arsip	35.000.000	900 Arsip	40.000.000	
2.24.03.2.01.0004 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun													

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCO ME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersusunnya Daftar Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	1000 Arsip	1000 Arsip	20.000.000	1200 Arsip	25.000.000	1400 Arsip	30.000.000	1600 Arsip	35.000.000	1800 Arsip	40.000.000	

4.5. Uraian Sub Kegiatan Yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Pada dasarnya kinerja organisasi perangkat daerah dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Pencapaian kinerja organisasi harus ditetapkan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian Program prioritas pembangunan daerah. Secara terperinci, sub kegiatan yang mendukung program prioritas tersebut antara lain adalah :

Tabel 4.4

Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
NIHIL				

4.6. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah merupakan turunan dari sasaran strategis Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang tercantum dalam RPJMD. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto mendukung Sasaran dari Misi ke 1 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, yaitu **Meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.** Sehingga tujuan jangka menengah dari Dinas perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto yang mendukung Sasaran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih serta sesuai dengan tugas dan fungsinya adalah **Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.**

Adapun indikator tujuan yang digunakan untuk mengukur kinerja adalah Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat), dengan target capaian setiap tahunnya adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan	Nilai	88,75	88,8	89	89,5	90	90,5	91	
2.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	82,75 (A)	82,8 (A)	83 (A)	83,2 (A)	83,4 (A)	83,6 (A)	83,8 (A)	
3.	Nilai Inovasi (IGA) Perangkat Daerah	Nilai	n/a	85	86	87	88	89	90	

4.7. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator selain indikator kinerja utama perangkat daerah yang mendukung langsung pencapaian kinerja visi dan misi kepala daerah terpilih tahun 2025-2029 dan dipergunakan sebagai keselerasan dengan indikator pada level Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat yaitu Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto adalah antara lain :

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

No	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)	SATUAN	BASELINE 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (TGM)	Nilai	66,98	67,1	67,2	67,3	67,4	67,5	67,6	
2.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Nilai	63,7	72,25	72,35	72,45	72,55	72,65	72,75	
3.	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Berkas	322,14	322,16	322,17	322,20	322,21	322,22	322,24	
4.	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Berkas	$T = (1.137 + 125 + 696 + 120 + 25 + 20)/6 = 687,2$ arsip	688,5	690,2	691,8	693,5	695,2	698,5	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan untuk kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Mojokerto yang berisi Visi, Misi, Tujuan, kebijakan, Strategi, sasaran berikut indikator kinerja diharapkan mampu menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto. Rencana Strategis ini disusun sedemikian rupa sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Pemerintah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto.

Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto merupakan arahan makro bagi pelaksanaan pembangunan Perpustakaan dan Kearsipan jangka menengah yang bersifat elastis terhadap perubahan sesuai perkembangan. Secara operasional, Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025–2029 akan dijabarkan lebih lanjut dalam rencana tahunan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto.

Kaidah Pelaksanaan

Keberhasilan pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah diukur dari ketercapaian target-target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama semua pihak untuk mewujudkannya, dengan memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas digunakan sebagai pedoman bagi seluruh unit pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan Sub Kegiatan.
2. Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto.
3. Pedoman dan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja.

Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto merupakan instrumen penting dalam menjamin konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Mekanisme

pengendalian dilakukan secara berkala melalui pemantauan atas capaian indikator kinerja, realisasi program dan kegiatan, serta penggunaan anggaran. Hasil pengendalian akan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan korektif untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra.

Evaluasi Renstra dilaksanakan setiap tahun dan secara menyeluruh pada pertengahan periode (midterm review) dan akhir periode Renstra. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, serta memberikan masukan strategis bagi perbaikan perencanaan pembangunan di periode berikutnya. Di kemudian hari apabila terjadi perubahan-perubahan yang mempengaruhi factor ekonomi, social, politik maupun iklim yang dapat mengubah situasi epidemiologi maupun kebijakan sehingga rencana strategis yang telah disusun memerlukan penyesuaian, maka selama kurun waktu berlakunya rencana strategis ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya. dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan rencana strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto ini diucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya dan semoga upaya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto dapat dilaksanakan dan mencapai tujuan dengan lebih terarah dan terukur. Untuk itu diharapkan agar seluruh system organisasi di lingkungan Dinas perpustakaan dan Kearsipan dapat menjadikan Renstra ini sebagai pedoman dan mewujudkan kinerja organisasi yang diinginkan.


Plt. KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN KABUPATEN MOJOKERTO
Drs. Siswadi, MM
Pembina Utama Muda/IV/c
NIP. 196608101987011002